

**KEPEMIMPINAN KIAI DAN PARTISIPASI POLITIK SANTRI DI PP. AL-ISHLAH PRAMBON
TERGAYANG SOKO TUBAN**

Afdolu Nasikin

094254009 (PPKn, FIS,UNESA) afdholunasikhin@yahoo.com

H. M. Turhan Yani

0009075708 (PPKn, FIS,UNESA), mturhanyaniyani@yahoo.co.id

Abstrak

Budaya kepatuhan santri terhadap Kiai sangat terlihat di Pesantren salaf, pesantren bisa diibaratkan sebagai kerajaan kecil sebagaimana dikatakan oleh Zamakshyari Dhofier (1994:56) bahwa pesantren ibarat kerajaan kecil di mana Kiai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan serta memiliki pengaruh besar dalam kehidupan dan lingkungan pesantren. Kepemimpinan Kiai dan Partisipasi Politik Santri di PP.Al-Ishlah Prambon Tergayang Soko Tuban, dianalisis menggunakan teori Patron-Klien dengan menggunakan metode Kualitatif. Metode pengumpulan data dalam Penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan cara data reduction, data display dan verification. Kepatuhan Santri terhadap Kiai di PP. Al-Ishlah Prambon Tergayang Soko Tuban terjadi karena ada hubungan Patron-Klien antara Kiai dengan Santri, sehingga terjalin hubungan selayaknya Paternalistik. Santri di Pondok Pesantren Al-Ishlah dalam partisipasi politik di pengaruhi oleh Kiai, lingkungan dan budaya politik di Pesantren. Orientasi dan pandangan politik para Santri di PP. Al-Ishlah menunjukkan budaya politik yang Kaula dan komponen evaluative. Partisipasi politik yang dilakukan para Santri di Pesantren Al-Ishlah adalah partisipasi pasif. Tetapi mereka banyak yang menggunakan hak pilihnya ketika Pemilihan Umum. Peran KH. Mushlih Abdurrohman sebagai Pimpinan Pesantren kepada para santri untuk berpartisipasi politik dalam pemilihan umum juga terbukti dengan perintah untuk mengikuti Pemilihan Umum dan meliburkan kegiatan belajar mengajar di pesantren ketika ada Pemilihan Umum.

Kata kunci: Kiai, Patron-Klien, Partisipasi Politik, Pesantren

Abstract

The culture of moslem students' obedience to their moslem teacher is really seen in salaf moslem boarding school, moslem boarding school is similar to a small kingdom as what Zamakshyari Dhofier (1994:56) said that moslem boarding school is like a small kingdom where moslem teacher is an absolute authority which hold authorization, sovereignty and have big influences around the environment of moslem boarding school. The leadership of moslem teacher in influencing students' participation in Moslem boarding school in politic become a case to be analyzed by Patron-Client Theory using qualitaitive method. Methods of data collection in this research using observation and interviews. Analysis using data reduction method, the data display and verification. Students adherence to Moslem teacher in Al-Ishlah moslem boarding school Prambon Tergayang Soko Tuban because there Patron-client relationship between Moslem teacher with Students, so intertwined relationship as paternalistic. The participation of Moslem students in Al-Ishlah Moslem boarding school is influenced by their Moslem teacher, environment and politic culture in their Moslem boarding school. Orientation and viewpoint of Moslem students in Al-Ishlah Moslem boarding school show politic culture which Kaula and evaluative component. Politic participation which is done by Moslem students in Al-Ishlah Moslem boarding school is passive participation. But most of them use their right in election. KH. Mushlih Abdurrohman's role as the leader of Moslem boarding school is proven by the participation of his Moslem student in election, and also with the order to furlough the teaching and learning activity in Moslem boarding school when election arrived.

Key words: Moslem teacher, Patron-Client, Politic participation, Moslem boarding school

PENDAHULUAN

Pesantren mempunyai kekuatan yang dapat diandalkan, yaitu kiai sebagai pemimpin pesantren dan pesantren sendiri sebagai institusi dan sistem. Ada dua hal yang mengakari kekuatan kiai yaitu kredibilitas moral dan kemampuan mempertahankan pranata sosial yang diinginkan. Gelar kiai tidak semata-mata diberikan pada ulama yang mempunyai kedudukan, wibawa dan

pengaruh yang sama akan tetapi diberikan oleh masyarakat muslim karena kealiman dan pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat. kewibawaan kiai juga bersumber dari kemampuan-kemampuan supranatural yang dimilikinya. Walaupun sebenarnya sulit untuk membuktikan kebenarannya, namun kepercayaan masyarakat akan hal tersebut cukup besar dan sangat mempengaruhi dalam menghimpun kekuatan kiai. Kemampuan pesantren dalam mengontrol perubahan nilai

yang juga tak lepas dari peran kiai sebagai penyaring informasi yang masuk ke lingkungan kaum santri, mengajarkan hal-hal yang berguna dan membuang yang merusak. Pada saat seperti ini, kemampuan kiai pesantren telah terbukti dalam mengontrol nilai dan kebudayaan. Seberapa deras arus informasi yang masuk pesantren, Kiai tidak akan pernah kehilangan peranannya selama masih mampu menjaga pranata-pranata sosial dan perlunya perhatian dari tokoh-tokoh lain untuk memperkuat kiai dalam menjaga pranata-pranata itu.

Kemasyhuran atau ketekanan pesantren biasanya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dan peran Kiai sebagai orang yang menguasai dan mengajarkan ilmu agama di pesantren kepada para santri. Kepemimpinan Kiai di pesantren diakui cukup efektif untuk meningkatkan citra pesantren tersebut dimata masyarakat luas. Ketenaran pesantren biasanya berbanding lurus dengan nama besar kiaiinya terutama kiai pendiri pesantren tersebut. Sosok kiai di pesantren tidak hanya selaku guru yang mengajarkan agama tetapi juga menjadi figur pemimpin yang mampu mengarahkan para santri dan pengikut atau pendukungnya dalam menempuh jalan hidup dan kehidupan mereka sehari-harinya. Kiai merupakan pemimpin sekaligus tokoh masyarakat yang menjadi panutan umat di lingkungan bahkan simpatisan dan pendukung kiai bisa menembus batas wilayah pesantren.

Di Indonesia peran kiai cukup berpengaruh dalam kehidupan baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik. Kiai adalah tokoh yang mempunyai posisi yang strategis dan sentral dalam masyarakat. Posisi mereka itu terkait dengan kedudukannya sebagai orang terdidik dan kaya dalam masyarakat. Sebagai orang terdidik kiai memberikan pengetahuan Islam kepada para santri. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional adalah sarana penting untuk melakukan transfer pengetahuan terhadap para santri. Dengan kekayaan yang dimilikinya kiai menjadi patron kepada siapa santri bergantung. Posisi sentral kiai dapat dilihat dalam pola patronase ini, terutama kalau pola ini menghubungkan dan mengikat kiai dengan para santri atau siswanya.

Hubungan Patron-Klien adalah sebuah pertukaran hubungan antara kedua peran yang dapat dinyatakan sebagai kasus khusus dari ikatan *dyadic* (dua orang) yang terutama melibatkan persahabatan instrumental di mana seorang individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumberdaya yang dimilikinya untuk menyediakan perlindungan dan atau keuntungan bagi seseorang dengan status lebih rendah (klien). Pada gilirannya, klien membalasnya dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan, termasuk jasa pribadi, kepada patron (Scott, 1993:7).

Hubungan Patron-Klien ini sangat terlihat di lingkungan pesantren. Keberadaan Kiai dengan posisinya sebagai elite agama, memiliki peran khas di Pondok pesantren maupun di tengah-tengah masyarakat, yaitu sebagai pemimpin spiritual. Hubungan antara kiai dengan santrinya bersifat emosional, dalam jarak yang dekat, membentuk hubungan bapak-anak, di mana pemberi dan penerima nasehat mampu membentuk ikatan yang kukuh.

Pola hubungan seperti ini akan melahirkan sikap-sikap loyal dan kepatuhan yang tinggi kepada sang kiai. Para jamaahnya melihat kiai sebagai sosok manusia yang berilmu, pewaris nabi, contoh teladan dalam kehidupan, tempat bertanya, penolong lewat bantuan do'anya yang dianggap sebagai barokah dan bahkan mereka menganggap Kiai sebagai tumpuan semua persoalan dalam kehidupan.

Terdapat dua pola hubungan antara Kiai dan Santri. *Pertama*, pola hubungan *Otoriter-Paternalistik*. Yaitu pola hubungan antara pimpinan dan bawahan (*Patron-Client Relationship*). *Kedua*, pola hubungan *laissez faire*, Yaitu pola hubungan Kiai santri yang tidak didasarkan pada tatanan organisasi yang jelas, semuanya didasarkan pada restu Kiai. Selama memperoleh restu dari sang kiai, sebuah pekerjaan bisa dilaksanakan. Santri ikhlas menjalankannya dan berharap mendapatkan barakah dari kiai (Amin Haedari, 2004:61).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengenai Kepemimpinan Kiai dan Partisipasi Politik Santri di PP. Al-Ishlah Prambon Tergayang Soko Tuban, dengan tujuan untuk mengetahui Budaya Politik dan Kepemimpinan Kiai serta Partisipasi Politik Santri di PP. Al-Ishlah Prambon Tergayang Soko Tuban.

Ada dua unsur kata yang akan didefinisikan secara terpisah, yaitu kepemimpinan dan kiai. Definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya (Rivai, 2003)

Berbagai definisi kepemimpinan sudah dipaparkan oleh para ahli dari Barat seperti Koonts dan O'Donnel (1958:429) bahwa kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan pengaruh interpersonal, melalui komunikasi, kearah pencapaian tujuan. Sedangkan GR Terry (1972:458) memberikan Batasan bahwa kepemimpinan adalah hubungan di mana satu orang, pemimpin mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dengan rela pada tugas-tugas terkait untuk mencapai apa yang diinginkan pemimpin.

Batasan-batasan di atas mencerminkan bahwa menyangkut sebuah proses pengaruh sosial yaitu pengaruh yang disengaja dijalankan seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan dalam sebuah kelompok atau organisasi. Dengan demikian, kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pimpinan dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari komunikasi interaktif antara pemimpin dan yang dipimpin (kartini kartono, 1990:5)

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi, mengorganisir, menggerakkan, mengarahkan atau mempengaruhi orang lain (bawahan) untuk melaksanakan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan. Setidaknya ada lima unsur-unsur dalam kepemimpinan, unsur-unsur dimaksud adalah : a) Adanya seorang yang berfungsi memimpin, yang disebut

pemimpin, b) Adanya orang lain yang dipimpin, c) Adanya kegiatan menggerakkan orang lain yang dilakukan dengan mempengaruhi dan mengarahkan perasaan, pikiran dan tingkah lakunya, d) Adanya tujuan yang hendak dicapai, baik yang dirumuskan secara sistematis maupun bersifat seketika, e) Berlangsung berupa proses di dalam kelompok/organisasi, baik besar dengan banyak maupun kecil dengan sedikit orang yang dipimpin (Handari nawawi dan Martini hadari, 2004:15).

Sedangkan istilah kiai kata Manfret Ziemek (1986:130), bukan berasal dari bahasa Arab melainkan dari bahasa Jawa. Kata kiai memiliki definisi yang majemuk. Kata kiai bisa berarti : 1) sebutan bagi alim ulama (cerdik pandai dalam agama Islam); 2) Alim ulama; 3) sebutan bagi guru ilmu gaib (dukun dan sebagainya); 4) kepada distrik (di Kalimantan Selatan); 5) sebutan yang mengawali nama benda yang dianggap berbuah (senjata, gamelan, dan sebagainya); dan 6) sebutan samaran untuk harimau (jika orang melewati hutan). Selain dari pada itu di daerah Jawa, perkataan kiai dipakai dalam bahasa Jawa untuk tiga jenis gelar, yakni : Sebutan gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, misalkan Kiai Garuda Kencana dipakai untuk sebutan Kereta Emas yang ada di Keraton Yogyakarta, Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya, Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya. Selain gelar kiai, ia juga sering disebut seorang 'alim (orang yang dalam pengetahuan Islamnya) (Dhofir, 1994:55).

Dari penjelasan tentang kepemimpinan dan kiai, kemudian kita membahas definisi kepemimpinan kiai. Kepemimpinan kiai dapat diartikan sebagai seni memanfaatkan seluruh daya (dana, sarana dan tenaga) pesantren untuk mencapai tujuan pesantren. Kepemimpinan kiai juga dapat digambarkan sebagai sosok kiai yang kuat kecakapan dan pancaran kepribadiannya sebagai seorang pemimpin pesantren, yang hal itu menentukan kedudukan dan kaliber suatu pesantren. Kemampuan kiai menggerakkan massa yang bersimpati dan menjadi pengikutnya akan memberkan peran strategis baginya sebagai pemimpin informal masyarakat melalui komunikasi intensif dengan penduduk yang mendukungnya (Manfret Ziemek, 1986:138).

Kharisma kiai memperoleh dukungan masyarakat hingga batas tertentu, karena dia dipandang memiliki kemantapan moral dan kualitas iman yang melahirkan model kepribadian magnetis bagi para pengikutnya. Proses ini mula-mula beranjak dari kalangan terdekat, sekitar kediamannya, kemudian melebar keluar menuju tempat-tempat yang jauh, seperti kharisma KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Chasbullah di Jombang, KH. Kholil Bangkalan dan KH.R. As'ad Syamsul Arifin dari Sitobondo dan beberapa kyai lain, terutama mereka yang berafiliasi pada organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Kharisma yang dimiliki kyai tersebut dalam sejarahnya mampu menjadi sumber inspirasi perubahan dalam masyarakat.

Dengan kharisma yang dimilikinya, kiai tidak hanya dikategorikan sebagai elit agama, tetapi juga sebagai elit pesantren dan tokoh masyarakat yang memiliki otoritas tinggi dalam menyimpan dan menyebarkan pengetahuan keagamaan Islam serta berkompeten dalam mewarnai corak dan bentuk kepemimpinan, terutama dalam pesantren. Kharisma yang melekat pada dirinya menjadi tolok ukur kewibawaan pesantren.

Kiai adalah pemimpin non formal sekaligus pemimpin spiritual, dan posisinya sangat dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat lapisan bawah di desa-desa. Sebagai pemimpin masyarakat, kiai memiliki jemaah komunitas dan massa yang diikat oleh hubungan keguyuban yang erat dan ikatan budaya paternalistik. Petuah-petuahnya selalu didengar, diikuti dan dilaksanakan oleh jemaah, komunitas dan massa yang dipimpinnya (Faisal Ismail, 1999:39-40).

Kepercayaan masyarakat yang begitu tinggi terhadap kiai dan didukung potensinya memecahkan berbagai problem sosiologis, psikis kultural, politik, maupun religius menyebabkan kiai menempati posisi kelompok elit dalam struktur sosial dan politik di masyarakat. Kiai sangat dihormati oleh masyarakat melebihi penghormatan mereka terhadap pejabat setempat. Petuah-petuahnya memiliki daya pikat yang luar biasa, sehingga memudahkan baginya untuk menggalang massa baik secara kebetulan maupun terorganisasi. Ia memiliki pengikut yang banyak jumlahnya dari kalangan santri dalam semua lapisan mulai dari anak-anak sampai kelompok lanjut usia.

Kepemimpinan kiai pada akhirnya mengalami perubahan, yakni kepemimpinan individual dan kepemimpinan kolektif. Kepemimpinan Individual pada eksistensi Kiai sebagai pemimpin pesantren, ditinjau dari tugas dan fungsinya dapat dipandang sebagai sebuah fenomena yang unik. Dikatakan unik karena kiai sebagai pemimpin sebuah lembaga Pendidikan Islam tidak sekedar bertugas menyusun kurikulum, membuat peraturan tata tertib, merancang sistem evaluasi, sekaligus melaksanakan proses belajar mengajar yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama di lembaga yang diasuhnya, melainkan pula sebagai pembina dan pendidik umat serta menjadi pemimpin masyarakat (Imran Arifin, 1993:45).

Peran yang begitu sentral yang dilaksanakan oleh Kiai seorang diri menjadikan pesantren ini sulit berkembang. Perkembangan atau besar tidaknya pesantren semacam ini sangat ditentukan oleh kekharismaan kiai yang mengasuhnya. Dengan kata lain semakin kharismatik kiai (pengasuh) maka semakin banyak masyarakat yang akan berduyun-duyun untuk belajar bahkan hanya untuk mencari barokah dari kiai tersebut dan tentunya pesantren tersebut akan lebih besar dan berkembang dengan pesat.

Selanjutnya pergantian kepemimpinan pesantren berlangsung secara kekeluargaan. Kepemimpinan di pesantren selama ini lazimnya bercorak alami. Pengembangan pesantren maupun proses pembinaan calon pemimpin yang akan menggantikan pemimpin yang ada, belum memiliki bentuk yang teratur dan

menetap. Hanya saja ada kebiasaan bahwa kiai yang paling tua adalah pemegang otoritas penuh dalam kepemimpinan pesantren. Dan semua problem di pesantren akan berpulang pada kemauan dan selera kiai. Keputusan yang diambil kiai tidak dapat diganggu gugat, karena tidak ada yang berani dan tidak ada yang diperbolehkan untuk menentang keputusan kiai tersebut, walaupun keputusan tersebut tidak begitu menguntungkan pesantren.

Kiai adalah figur sentral karena seluruh penyelenggaraan pesantren terpusat padanya. Ia merupakan sumber utama ada yang berkaitan dengan soal kepemimpinan, ilmu pengetahuan, dan misi pesantren. Maka kebijakan pesantren untuk menerima dan menolak misalnya sekolah formal sangat bergantung pada kebijakan kiai pesantren tersebut. Oleh karena itu sering kali kiai disebut sebagai raja di kerajaan kecil, yakni pesantren.

Kepemimpinan individual kiai inilah yang sesungguhnya mewarnai pola relasi di kalangan pesantren dan telah berlangsung dalam rentang waktu yang lama sejak berdirinya pesantren pertama hingga sekarang dalam kebanyakan kasus. Lantaran kepemimpinan individual kiai ini pula sehingga memperkokoh kesan bahwa pesantren adalah milik pribadi kiai, atau sebaliknya karena pesantren tersebut milik pribadi kiai maka kepemimpinan yang dijalankan adalah kepemimpinan individual (Mujamil Qomar, 2004:40). Dengan kepemimpinan semacam ini pesantren terkesan sangat eksklusif. Tidak ada celah yang longgar untuk masuknya pemikiran-pemikiran ataupun usulan-usulan dari luar walaupun untuk kebaikan dan pengembangan pesantren karena hal itu merupakan wewenang mutlak kiai. Hal seperti ini biasanya masih berlangsung di pesantren salaf.

Model kepemimpinan semacam ini sangat mempengaruhi terhadap eksistensi pesantren. Bahkan belakangan ini ada pesantren yang dilanda masalah kepemimpinan ketika ditinggal oleh kiai pendirinya. Hal ini disebabkan tidak adanya anak kiai yang mampu meneruskan kepemimpinan pesantren yang ditinggalkan oleh ayahnya baik dari segi penguasaan ilmu keislaman maupun pengelolaan kelembagaan. Maka kesinambungan pesantren menjadi terancam (Shobirin Najd, 1985:114).

Krisis kepemimpinan juga bisa terjadi apabila kiai terjun ke dalam partai politik praktis. Kesibukannya di politik akan menurunkan perhatiannya terhadap pesantren, dan tugas utamanya sebagai pembimbing santri terabaikan, sehingga kelangsungan aktivitas pesantren menjadi terbengkalai.

Adapun pergantian kepemimpinan di pesantren dilaksanakan apabila kiai yang menjadi pengasuh utama meninggal dunia. Jadi kiai adalah pemimpin pesantren seumur hidup, apabila kiai sudah meninggal maka estafet kepemimpinan biasanya dilanjutkan oleh adik tertua dan kalau tidak mempunyai adik atau saudara biasanya kepemimpinan langsung digantikan oleh putra kiai. Biasanya kiai mengkader putra-putranya untuk meneruskan kepemimpinannya, namun jika kaderisasi itu gagal biasanya yang melanjutkan adalah menantu yang paling pandai, atau menjodohkan putrinya dengan putra

kiai lain. Jadi tidak ada peluang untuk masuknya orang luar menjadi pemimpin pesantren tanpa memasuki jalur feodalisme kiai. Dengan demikian, jelaslah bahwa posisi kepemimpinan kiai adalah posisi yang sangat menentukan kebijaksanaan di semua segi kehidupan pesantren, sehingga cenderung menumbuhkan otoritas mutlak, yang pada hakekatnya justru berakibat fatal. Namun profil kiai di atas pada umumnya hanyalah terbatas pada kiai pengasuh pesantren-pesantren tradisional yang memegang wewenang (otoritas) mutlak dan tidak boleh diganggu gugat oleh pihak manapun. Sedangkan kiai-kiai di pesantren khalaf ataupun modern tidaklah sedemikian otoriter.

Sedangkan Kepemimpinan kolektif dapat diartikan sebagai proses kepemimpinan kolaborasi yang saling menguntungkan yang memungkinkan seluruh elemen sebuah institusi turut ambil bagian dalam membangun sebuah kesepakatan yang mengakomodir tujuan semua. Kolaborasi yang dimaksud bukan hanya sekedar berarti "setiap orang" dapat menyelesaikan tugasnya, melainkan yang terpenting adalah semuanya dilakukan dalam suasana kebersamaan dan saling mendukung (*al-jam'iyah al murassalah* atau *collegiality and supportiveness*) (Amin Hadari dan M. Ishom, 2004:22).

Model kepemimpinan kolektif atau yayasan ini menjadi solusi strategis. Beban kiai menjadi lebih ringan karena ditangani bersama sesuai dengan tugas masing-masing. Kiai juga tidak terlalu menanggung beban moral tentang kelanjutan pesantren di masa depan. Sebagai pesantren yang pernah menjadi paling berpengaruh se Jawa Madura, ternyata tahun 1984 pesantren Tebuireng mendirikan Yayasan Hasyim Asy'ari yang mengelola seluruh mekanisme pesantren secara kolektif (Imron Arifin, 1993:104).

Namun tidak semua kiai pesantren merespon positif terhadap solusi tersebut. Mereka lebih mampu mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang mungkin timbul dibanding dengan kelebihanannya. Keberadaan yayasan dipahami sebagai upaya menggoyah kepemimpinan kiai, padahal sebaliknya, keberadaan yayasan ini justru ingin meringankan bebannya baik beban akademik maupun beban moral. Kecenderungan untuk membentuk yayasan ternyata hanya diminati pesantren-pesantren yang tergolong modern, dan belum berhasil memikat pesantren tradisional. Kiai pesantren tradisional cenderung lebih otoriter daripada kiai pesantren modern (Mujamil Qomar, 2004:45).

Pesantren memang sedang melakukan konsolidasi organisasi kelembagaan khususnya pada aspek kepemimpinan dan manajemen. Secara tradisional, kepemimpinan pesantren dipegang oleh satu atau dua orang kiai, yang biasanya merupakan pendiri pesantren yang bersangkutan. Tetapi karena diversifikasi pendidikan yang diselenggarakan, maka kepemimpinan tunggal kiai tidak memadai lagi. Banyak pesantren kemudian mengembangkan kelembagaan yayasan yang pada dasarnya merupakan kepemimpinan kolektif.

Konsekuensi dari pelembagaan yayasan ini adalah perubahan otoritas kiai yang semula bersifat mutlak menjadi tidak mutlak lagi, melainkan bersifat

kolektif ditangani bersama menurut pembagian tugas masing-masing individu kendati peran kiai masih dominan. Ketentuan yang menyangkut kebijaksanaan-kebijaksanaan pendidikan merupakan konsensus semua pihak. Yayasan memiliki peran yang cukup besar dalam pembagian tugas yang terkait dengan kelangsungan pendidikan pesantren. Perubahan dari kepemimpinan individual menuju kepemimpinan kolektif akan sangat berpengaruh terhadap hubungan pesantren dan masyarakat. Kalau semula hubungan semula bersifat patron klien, yakni seorang kiai dengan karisma besar berhubungan dengan masyarakat luas yang menghormatinya. Sekarang, hubungan semacam itu semakin menipis. Justru yang berkembang adalah hubungan kelembagaan antara pesantren dengan masyarakat (Shonhaji Sholeh, 1997:7).

Budaya politik adalah cara individu berpikir, merasa, dan bertindak terhadap sistem politik serta bagian-bagian yang ada di dalamnya, termasuk sikap atas peranan mereka sendiri di dalam sistem politik. Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

Almond dan Verba (Dalam Afan Gaffar, 2005:101) mendefinisikan budaya politik sebagai:

“Suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu”.

Prof. Miriam Budiardjo (2007:49) menyatakan bahwa salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik yang mencerminkan faktor subyektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya. Kegiatan politik seseorang misalnya, tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, akan tetapi juga oleh harapan-harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi politik. Bentuk dari budaya politik dalam suatu masyarakat dipengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan dari sistem, oleh agama yang terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan dan sebagainya.

Ketika terdapat interaksi antara manusia satu dengan yang lain, akan selalu terkait dengan pengetahuan, sikap dan nilai seseorang yang kemudian memunculkan orientasi sehingga timbul budaya politik. Orientasi politik itulah yang kemudian membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang muncul tersebut akhirnya mempengaruhi budaya politik seseorang.

Orientasi politik tersebut dapat dipengaruhi oleh orientasi individu dalam memandang obyek-obyek politik. Almond dan Verba (Dalam Afan Gaffar,

2005:99-100) mengajukan klasifikasi tipe-tipe orientasi politik, yaitu : *komponen kognitif*, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya sistem politik dan akibatnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lain sebagainya. *Komponen afektif*, yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranan yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu. *Komponen evaluatif*, yaitu menyangkut keputusan dan praduga tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Kemudian Almond dan Verba (1990:20-22) membagi budaya politik dalam tiga klasifikasi, yakni budaya politik parokial, budaya politik kaula atau subjek dan budaya politik partisipan. Penjelasan dari klasifikasi tiga tipe budaya politik sebagai berikut: Budaya politik parokial (*parochial political culture*) adalah spesialisasi peranan-peranan politik atau tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Budaya politik parokial juga ditandai oleh tidak berkembangnya harapan-harapan akan perubahan yang akan datang dari sistem politik. Budaya politik parokial yang kurang lebih bersifat murni merupakan fenomena umum yang biasa ditemukan didalam masyarakat-masyarakat yang belum berkembang, dimana spesialisasi politik sangat minimal. Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana, dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil, sehingga pelaku-pelaku politik belumlah memiliki pengkhususan tugas. Tetapi peranan yang satu dilakukan bersamaan dengan peranan yang lain seperti aktivitas dan peranan pelaku politik dilakukan bersamaan dengan peranannya baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun keagamaan/spiritual.

Budaya politik subyek (*kaula*) memiliki frekuensi orientasi-orientasi yang tinggi terhadap sistem politiknya, namun perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan (*input*) dan partisipasinya dalam aspek keluaran (*output*) sangat rendah. Subjek individual menyadari akan otoritas pemerintah yang memiliki spesialisasi, ia bahkan secara afektif mengorientasikan diri kepadanya, ia memiliki kebanggaan terhadapnya atau sebaliknya tidak menyukainya, dan ia menilainya sebagai otoritas yang absah. Namun demikian, posisinya sebagai subyek (*kaula*) mereka pandang sebagai posisi yang pasif. Diyakini bahwa posisinya tidak akan menentukan apa-apa terhadap perubahan politik. Mereka beranggapan bahwa dirinya adalah subyek yang tidak berdaya untuk mempengaruhi atau mengubah sistem. Dengan demikian secara umum mereka menerima segala keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam masyarakat. Bahkan rakyat memiliki keyakinan bahwa apapun keputusan/kebijaksanaan pejabat adalah

mutlak, tidak dapat diubah-ubah, dikoreksi apalagi ditentang.

Budaya politik partisipan adalah suatu budaya politik dimana para warga masyarakat memiliki orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahkan terhadap struktur, proses politik dan administratif. Dengan perkataan lain, perhatian dan intensitas terhadap masukan maupun keluaran dari sistem politik sangat tinggi. Dalam budaya politik partisipasi dirinya atau orang lain dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, ia memiliki kesadaran terhadap hak dan tanggung jawabnya. Masyarakat juga merealisasikan dan mempergunakan hak-hak politiknya. Dengan demikian, masyarakat dalam budaya politik partisipan tidak begitu saja menerima keputusan politik. Hal ini karena masyarakat telah sadar bahwa betapapun kecilnya mereka dalam sistem politik, mereka tetap memiliki arti bagi berlangsungnya sistem itu.

Partisipasi politik adalah sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. (Budiarjo:1994:183).

Menurut Kencana Syafi'i (2002:132) partisipasi politik adalah kegiatan warga negara preman yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Syarbaini (2004:69) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Dusseldrop (Susilo:2003:72) mengartikan partisipasi sebagai kegiatan atau keadaan mengambil bagian dalam suatu aktivitas untuk mencapai suatu kemanfaatan secara optimal. Cohen dan Uphoff (Susilo:2003:72) partisipasi adalah ketelibatan alam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, program, memperoleh kemanfaatan, dan mengevaluasi program. Menurut Davis (Susilo:2003:72) partisipasi adalah ketelibatan mental dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong dirinya untuk memberi sumbangan bagi tercapainya tujuan untuk membagi tanggung jawab di antara mereka.

Dari pengertian para tokoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah suatu kegiatan warga negara untuk ikut serta mempengaruhi proses pembuatan kebijakan politik dengan maksud agar kebijakan politik yang dibentuk oleh elite politik sesuai dengan keadaan dan keinginan rakyat, sehingga diharapkan kesejahteraan rakyat bisa terwujud. Partisipasi politik warga negara sangat berperan dalam proses penentuan kebijakan politik. Oleh karena itu segala usaha akan dilakukan oleh para elit politik untuk meningkatkan partisipasi warga negara. Dengan adanya kerjasama antar elite politik dengan warga negara, maka diharapkan segala aspirasi rakyat bisa terwujud.

Surbakti (1999:141) mengemukakan ada beberapa ciri-ciri kegiatan partisipasi politik, antara lain : (a) Partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar yang berupa sikap dan orientasi. (b) Kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. (c)

Kegiatan yang berhasil (efektif) atau yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. (d) Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. (e) Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) atau yang tidak berupa kekerasan (nonviolence).

Lane (Dalam Rush dan Althoff, 2000:181) dalam studinya mengenai keterlibatan politik, mempersoalkan bahwa partisipasi politik memenuhi empat macam fungsi, antara lain : (a) Sarana untuk mengejar kabutuhan ekonomi, partisipasi politik sering kali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya atau sebagai sarana untuk mencari keuntungan material. (b) Sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, yakni memenuhi kebutuhan akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting. Pergaulan yang luas bersama pejabat-pejabat itu pula yang mendorong partisipasi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas politik sehingga dengan demikian orang-orang tersebut akan puas bahwa politik dapat memenuhi kebutuhan terhadap penyesuaian sosialnya. (c) Sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, dalam hal ini orang berpartisipasi dalam politik dianggap dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek dan tender, melicinkan karier bagi jabatannya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai, akan makin mendorong partisipasinya dalam politik. (d) Sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, seperti kepuasan batin, perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan.

Sedangkan Samuel (2001:199) menyebutkan 4 faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, antara lain : (1) Sejauh mana orang menerima perangsang politik. Karena adanya perangsang, maka seseorang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi misalnya oleh sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau melalui diskusi formal. (2) Faktor karakteristik pribadi seseorang. Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, budaya, biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik. (3) Karakteristik sosial seseorang. Karakter sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan dan lain-lain tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Oleh sebab itulah, mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik. (4) Keadaan politik. Lingkungan politik yang kondusif

membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

Berdasarkan Keempatnya, Surbakti (1999:142) membagi partisipasi politik menjadi tiga macam yaitu : (a) Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik mengajukan alternatif kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain. (b) Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati perintah pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. (c) Golongan putih (Golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan.

Menurut Surbakti (1992:119) Peran serta Politik masyarakat didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir yaitu Faktor politik meliputi : (a) Komunikasi Politik Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik. Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika. (b) Pengetahuan Masyarakat. Pengetahuan Masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil (Ramlan Surbakti 1992 : 196). (c) Faktor Fisik Lingkungan. Faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaga dan pranatanya. (Budiarjo, 1985:22).

Pendapat di atas juga diperkuat oleh Jalbi (Dalam Ruslan 2000:101-102) bahwa partisipasi politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : (a) Keyakinan agama yang diminati oleh individu. Sebagai contoh Islam mendorong pemeluknya untuk memerintahkan yang ma'rif dan mencegah kemungkaran, mengkritik dan mengawasi penguasa, dan seterusnya. Ini merupakan dorongan internal dalam melakukan partisipasi politik. Faktor jenis individu: Laki-laki atau perempuan, juga berpengaruh besar terhadap partisipasi di sebagai masyarakat. Demikian juga taraf pendidikan. Semua ini sering disebut sebagai faktor-faktor sosial. (b) Jenis kultur politik, atau bentuk nilai dan keyakinan tentang kegiatan politik yang mempengaruhinya. Terkadang kultur politik mendorong seseorang untuk berpartisipasi politik secara aktif, tetapi terkadang justru menjadikan seseorang buta politik. (c) Karakter lingkungan politik. Dalam masyarakat yang

menghormati supremasi hukum dan kebebasan politik, sistem politiknya bersifat multipartai, mengakui hak kritik dan partisipasi rakyat, dan banyak memberi kesempatan kepada anggota masyarakatnya untuk melakukan partisipasi dalam kehidupan bernegara. Demikian pula, keberadaan partai-partai dengan segala ragamnya, juga berarti jaminan atas adanya oposisi yang institusional yang dengannya mereka melakukan partisipasi politik dan ikut mengambil keputusan. Artinya, ideologi dan sistem politik masyarakat memberikan pengaruh besar kepada partisipasi warganya.

Santri adalah murid pesantren yang tinggal di dalam pondok atau asrama meskipun adakalanya tinggal di rumah sendiri di sekitar pesantren. Adapun Zamakhsyari Dhofier (1982:51) berpendapat bahwa Santri yaitu murid-murid yang tinggal di dalam pesantren untuk mengikuti pelajaran kitab-kitab kuning atau kitab-kitab Islam klasik, yang pada umumnya terdiri dari dua kelompok santri yaitu *Santri Mukim* dan *Santri Kalong*. *Santri Mukim* adalah santri atau murid-murid yang berasal dari jauh yang tinggal atau menetap di lingkungan pesantren. Sedangkan *Santri Kalong* yaitu santri yang berasal dari desa-desa sekitar pesantren yang mereka tidak menetap di lingkungan kompleks pesantren tetapi setelah mengikuti pelajaran mereka pulang.

Asal usul kata santri menurut Nurcholis Majid (1997:19) memiliki dua acuan. Pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa santri itu berasal dari kata "sastri", sebuah kata dari bahasa sanskerta yang artinya melek huruf. Dari sini bias diasumsikan bahwa menjadi santri berarti juga menjadi tahu agama (melalui kitab-kitab). Atau paling tidak seorang santri itu bisa membaca Al-Qur'an. Kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa santri berasal dari kata "Catrik", yang artinya seorang yang selalu mengikuti seorang guru kemana guru itu pergi menetap dengan tujuan dapat belajar darinya mengenai suatu keahlian. Sekarang ini santri berarti orang yang dididik di lingkungan pesantren.

Santri dalam pengertian K.H Imam Sonhaji berasal dari kata *san* dan *tri*. *San* artinya harus pandai, *tri* artinya tiga, maksudnya adalah santri harus menguasai tiga hal utama, yaitu: 1) pandai ilmu agama, 2) pandai ilmu kemasyarakatan, 3) pandai ilmu kenegaraan. Pandai ilmu agama menyangkut pemahaman yang mendalam tentang agama sehingga suatu saat tampil sebagai pemimpin agama. Pandai ilmu kemasyarakatan menyangkut masa depan santri yang akan terjun ke masyarakat, dan bahkan jadi tokoh masyarakat yang mampu mewarnai lingkungan masyarakatnya. Sedangkan pandai dalam ilmu kenegaraan ditujukan untuk menjadi warga Negara yang baik, dalam arti faham tentang kewajiban dan hak warga Negara, bahkan tidak mustahil mewakili masyarakat dalam ikut serta meluruskan arah yang ditempuh Negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analisis dan jenis penelitian studi kasus. Dengan demikian, penelitian ini akan menyelidiki secara intensif mengenai Kepemimpinan Kiai dan partisipasi Politik Santri di

Pondok Pesantren Al-Ishlah Prambon Tergayang Soko Tuban. Tempat ini dipilih sebagai subjek penelitian, karena karakter Pesantren yang masih tradisional (*Salaf*), sehingga hubungan Patron-Klien antara Kiai dan Santri masih terlihat kuat, dan kepemimpinan Kiai sangat berpengaruh terhadap Santri.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya berjumlah sedikit dan lama kelamaan menjadi banyak. Karena pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*Purpose sample*) (Lexy J Moleong, 1993:224).

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan literatur. Pertama Observasi pada penelitian ini melalui cara berpartisipatif, yaitu melakukan dua peran sekaligus, yakni sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota dari kelompok yang diamati (Lexy J Moleong, 1993:176). Jadi peneliti langsung mendatangi lokasi penelitian yaitu di Pondok Pesantren AL-ISHLAH untuk mengikuti aktivitas keseharian di pesantren. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap Kiai, untuk mengetahui kegiatan keseharian di pondok pesantren. Kemudian terhadap Pengurus Pondok dan para santri untuk mengetahui model kepemimpinan Kiai dan bagaimana pandangan politik, serta partisipasi politik yang dilakukan para santri. Dalam proses wawancara ini, dipersiapkan pedoman wawancara agar wawancara fokus pada masalah penelitian. Tetapi tidak menutup kemungkinan bersifat terbuka jika sifatnya spontan sepanjang wawancara dengan para informan yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari informan. Apabila demikian, tetap ditambahkan untuk melengkapi data yang lebih terperinci. Literatur ini berupa rujukan atau referensi, baik dalam bentuk buku bacaan, berbagai dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan kajian penelitian ini, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, jurnal-jurnal penelitian, serta dokumen dari instansi terkait yang mendukung.

Untuk mencapai tujuan penelitian kualitatif tersebut, maka analisis data dengan cara: *Pertama*, reduksi data (*data reduction*), yaitu merangkum, memilih hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya (Sugiyono, 2009 : 249). Reduksi data dilakukan setelah memperoleh data dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada informan di Pondok Pesantren Al-Ishlah. Selanjutnya memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian mengelompokkannya berdasarkan tema. Dengan demikian, data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam dan mempermudah untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. *Kedua*, adalah penyajian data (*data display*). Data yang semakin bertumpuk-tumpuk kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan penyajian data. Menurut Miles dan Huberman (Purnama dalam Indrawati, 2011 : 28), penyajian data adalah analisis merancang deretan dan kolom dalam sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk data yang dimasukkan dalam kotak-kotak matriks. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dalam

setumpuk data (Husaini dan Purnomo, 2006 : 87). Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan (*verification*). Data yang telah diproses pada tahap pertama dan kedua, kemudian diambil kesimpulan.

Pada langkah ini, akan dilakukan pengecekan kembali kevalidan atau keabsahan temuan data sebagai upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur atau strategi-strategi tertentu (Creswell, 2010:285). Prosedur-prosedur atau strategi-strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan: (a) Triangulasi (*triangulate*). Langkah ini adalah menggunakan berbagai sumber-sumber data yang berbeda yang dapat digunakan untuk mengelaborasi dan memperkaya hasil penelitian tentang Kepemimpinan Kiai dan Partisipasi Politik Santri PP. Al-Ishlah Prambon Tergayang Soko Tuban. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Lexy J Moleong 2005 : 330). (b) Member Checking Yaitu dengan melakukan pengecekan transkrip wawancara kembali dan membawanya kepada informan penelitian untuk mengecek hasil akurasinya. Dan tidak menutup kemungkinan juga memberikan kesempatan pada mereka untuk berkomentar tentang hasil penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Kepemimpinan Kiai dan Partisipasi Politik Santri di Pondok Pesantren AL-ISHLAH Prambon Tergayang Soko Tuban

Pondok Pesantren Al-Ishlah merupakan Pondok Pesantren salaf yang berbentuk yayasan tetapi model kepemimpinannya bisa dikatakan Individual dan Kolektif. Bisa dikatakan Individual, karena peran dan pengaruh KH. Mushlih Abdurrohman selaku Pimpinan Pesantren cukup besar dalam pengelolaan Pesantren. Serta bisa dikatakan Kolektif, karena sudah ada pembagian kepengurusan dan berbentuk yayasan, meskipun dalam kepengurusan Pesantren mayoritas diisi oleh keluarga KH. Mushlih Abdurrohman, tetapi sudah ada pembagian tugas, seperti yang dijelaskan pada struktur kepengurusan di atas dan yang dikatakan oleh KH. Masruhin, S.Pd.I (Kurikulum) sebagai berikut:

“Namanya pondok pesantren juga butuh pengelolaan, ya ada bagiannya masing-masing, istilahnya pembagian tugas lah, pak Malik yang mengurus santri putra, Ibu nyai yang mengurus santri putri, tapi ya tetap kalau ada apa-apa harus koordinasi sama pak yai, meskipun sudah di bagi tugas kalau tidak sesuai apa yang diinginkan pak yai kan tidak enak. Kalau pak yai ya pasti hanya mengurus pesantren, tapi biasanya hanya ngasih tau saja di suruh begini-begitu, ngecek bagaimana-bagaimananya, pokoknya apa perintahnya pak yai nanti yang jalan orang-orang (pengurus), hanya begitu saja”. (Wawancara dengan KH. Masruhin, S.Pd.I, hari sabtu 7 September 2013 Pukul 19.30)

Melihat pernyataan dari Informan (KH. Masruhin, S.Pd.I) bahwa apa yang dipaparkan menunjukkan adanya pembagian tugas atau struktur, tetapi pengasuh Pesantren yaitu KH. Mushlih Abdurrohman masih mempunyai otoritas untuk intervensi dalam pengelolaan Pesantren, apa yang menjadi keinginan Kiai harus dilaksanakan pengurus, bukan berarti paksaan, tetapi suatu ketaatan atau kehormatan Santri terhadap Kiai, bahwa Kiai memiliki Kharisma yang besar. Sama halnya apa yang dikatakan oleh M. Nasro'in (Bendahara) sebagai berikut:

"Ya meskipun kita pengurus ya tidak bisa semuanya sendiri, kita hanya melaksanakan perintah yai, kalau disuruh ke utara ya ke utara, kalau disuruh ke selatan ya keselatan. Tetapi biasanya kalau ada pembangunan atau pengembangan pesantren pasti yai mengadakan musyawarah antar pengurus, baiknya bagaimana. Kalau masalah pengelolaan atau pengurusan pesantren, ya memang semua putra yai ikut mengurus dan mengajar juga, Pak Malik, Pak Ukin kan ya menantunya yai, Gus Dhor, Mbak ana, Mbak Fidah, ya semua membantu". (Wawancara dengan M. Nasro'in hari sabtu 7 September 2013 Pukul 21.30)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh KH. Masruhin, S.Pd.I sebagai berikut:

"Budaya di pondok pesantren itu diajari sopan santun, rendah hati (tawadzu'), hormat kepada orang tua, guru, dan Kiai. Jadi jika ada santri yang tidak punya hormat kepada Kiai itu namanya tidak punya adab, tapi anak-anak baik-baik ko', tidak ada yang seperti itu". (Wawancara dengan KH. Masruhin, S.Pd.I hari sabtu 8 September 2013 Pukul 20.30)

Apa yang dikatakan Ustadz M. Nasro'in menunjukkan adanya sikap demokratis KH. Mushlih Abdurrohman yaitu adanya musyawarah pengurus terkait pengembangan dan pengelolaan Pondok Pesantren meskipun di sisi lain para Santri sangat rendah hati (*tawadzu'*), hormat (*takdzim*) dan mengikuti apa yang diperintahkan Kiai seperti yang dikatakan KH. Masruhin, S.Pd.I.

Kiai memperoleh posisi yang amat istimewa di lingkungan masyarakat, karena dengan kemampuan dan pengetahuan keagamaannya, mereka telah menempatkan dirinya sebagai Ulama.

Sosok KH. Mushlih Abdurrohman di mata Santrinya adalah sosok yang Kharismatik, alim serta suritauladan bagi masyarakat dan Santri-santrinya. Seperti yang dipaparkan oleh M. Ikhsan Hanafi sebagai berikut:

"Bagaimana ya, ya begitu kang, pak Yai kan Ulama' ya sosoknya jadi panutan orang banyak. Santrinya banyak, jamaahnya banyak. Ya tidak, tidak aneh-aneh seperti Kiai-Kiai yang lain yang ikut-ikut politik". (Wawancara dengan M. Ikhsan Hanafi hari sabtu 7 September 2013 Pukul 23.00)

Besarnya Pengaruh Kepemimpinan KH. Mushlih Abdurrohman di lingkungan Pesantren membuat kedekatan antara Kiai dan Santri menjadi sangat erat hingga memunculkan hubungan Patron-Klain. Kiai menjadi sosok yang sangat dihormati dan diikuti perintahnya oleh para Santri dalam berbagai hal termasuk partisipasi politik.

Partisipasi Politik masyarakat bisa tergolong aktif, pasif, maupun golput itu terjadi karena ada faktor yang mempengaruhinya, seperti Komunikasi Politik, Pengetahuan Masyarakat, Faktor Fisik Lingkungan, maupun pendidikan Politik yang diperolehnya. Kesadaran pentingnya berpartisipasi Politik merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan demokrasi, karena setiap keputusan Politik yang dibuat pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, oleh karena itu setiap warga Negara berhak ikut serta dalam menentukan keputusan Politik tersebut.

Kesadaran para Santri Al-Ishlah dalam berpartisipasi Politik hanya sebatas ketika ada Pemilihan Umum, Santri mengetahui kegiatan Politik hanya sebatas Pemilihan Umum, baik itu pemilihan Presiden, Gubernur, maupun Bupati. Kurangnya pendidikan dan pemahaman Politik menjadikan Santri di Pesantren Al-Ishlah memahami Politik hanya sebatas Pemilihan Umum. Seperti yang disampaikan oleh Nurul Huda salah satu Santri Putra sebagai berikut:

"Politik itu ya Pemilu, setahu saya ya itu, tidak tau kalau ada yang lain, orang tidak sekolah seperti saya ini tidak mengerti apa-apa kang, ya setahu saya ya pemilu, pemilihan Bupati kemaren ya nyoblos, besok pemilihan Gubernur tidak tahu nyoblos siapa. Kalau pemilihan umum pasti nyoblos, Santri yang lain juga yang mendapatkan kartu pemilih". (Wawancara dengan Nurul Huda hari jum'at 23 Agustus 2013 Pukul 21.30)

Kurangnya pendidikan Politik bagi Santri yang menyebabkan Santri kurang paham dengan kegiatan Politik, sehingga memicu Santri untuk acuh terhadap kegiatan Politik, kecuali Pemilihan Umum yang mereka ketahui bahwa itulah Politik. Tetapi mereka faham dan sadar bahwa Pemilihan Umum itu adalah hajat masyarakat yang harus ikut serta dan banyak para Santri yang menggunakan hak pilihnya. Seperti pada pemilihan Gubernur, banyak Santri yang menggunakan hak pilihnya, seperti yang di katakan oleh Darmudi salah satu Santri mengatakan sebagai berikut:

"Pemilu itu ibaratnya hajatnya masyarakat mas, kalau tidak ikut kan kurang pantas, ada rame-rame ya ikut meramaikan. Banyak Santri kemaren yang mengikuti pemilihan Gubernur, belajar ngajinya diliburkan, jadi rame di depan". (Wawancara dengan Darmudi hari jum'at 6 September 2013 Pukul 09.30)

Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah selalu mengikuti kegiatan Pemilihan Umum, mereka hanya berpartisipasi secara pasif yaitu hanya menggunakan hak

suaranya, tidak ada satu Santri pun yang terlibat sebagai tim pemenang dalam Pemilu. Kegiatan partisipasi Politik ini juga didukung oleh pihak Pesantren dengan meliburkan kegiatan belajar mengajar selama Pemilihan Umum, agar seluruh Santri yang punya hak pilih bisa mengikuti Pemilihan Umum. Hal ini disampaikan oleh KH. Mushlih Abdurrohman sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ishlah mengatakan sebagai berikut:

“Jika ada pemilihan umum kegiatan pesantren diliburkan, anak sebanyak ini kalau kegiatan tidak diliburkan akan menumpuk di TPS, yang tidak bisa mencoblos nanti saya yang berdosa, itu sudah haknya mereka. Tetapi meskipun libur, Santri dilarang pulang karena tidak libur panjang”. (Wawancara dengan KH. Mushlih Abdurrohman hari Kamis 26 September 2013 Pukul 18.30)

Melihat pemaparan para responden di atas menunjukkan adanya bentuk antusias dari para Santri dan pihak Pesantren untuk berpartisipasi Politik dalam Pemilihan Umum, bahkan dukungan dari Pimpinan Pesantren yaitu KH. Mushlih Abdurrohman dengan meliburkan kegiatan belajar mengajar di Pesantren ketika ada Pemilihan Umum. Bentuk antusiasnya para Santri ikut berpartisipasi dalam pemilu dipengaruhi oleh berbagai sebab, ada yang karena kesadaran pribadi, mengikuti teman, dan mengikuti saran Kiainya. Demikian pengakuan Anny Farihatun Nisa' salah satu Santri putri mengatakan sebagai berikut:

“Mengikuti pemilu itu kan haknya semua warga negara Indonesia kan mas, jadi ya tidak usah disuruh seharusnya ya mengerti lah, kesadaran diri ikut berpartisipasi, kan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, kalau memang saya orang Indonesia ya harus ikut mencoblos, disuruh atau tidak ya berangkat, biasanya mencoblos di depan pesantren apa susahny. hehe”. (Wawancara dengan Anny Farihatun Nisa' hari jum'at 13 september 2013 Pukul 09.30)

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Santri lain, bahwa ikut berpartisipasi dalam Pemilu karena sudah disarankan Kiai untuk ikut berpartisipasi. Seperti kata Ahmad Munif salah satu Santri mengatakan sebagai berikut:

“Iya kang, pasti ikut kalau ada pemilihan umum, bagaimana lagi pesantren juga libur, diliburkan supaya anak-anak bisa ikut nyoblos, Yai ya selalu menyampaikan kalau ada pemilu, anak-anak yang sudah berumur (yang sudah punya hak pilih) disuruh ikut mencoblos, Pak Yai saja nyoblos, kalau santrinya tidak ikut nyoblos kan malu kang”. (Wawancara dengan Ahmad Munif hari Selasa 10 September 2013 Pukul 22.00)

Bentuk Kharisma Kiai masih terlihat di Pesantren Al-Ishlah, seperti paparan dari para responden diatas, para Santri sangat hormat kepada Kiainya seperti ketika ada perintah untuk mengikuti partisipasi dalam Pemilu para Santri banyak yang ikut berpartisipasi. KH.

Mushlih Abdurrohman selalu bersikap bijaksana meskipun posisinya sebagai Kiai sangat dihormati dan diikuti oleh Santrinya, beliau tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk mendukung salah satu calon peserta Pemilu. Beberapa kali Pesantren sering di datangi orang-orang Partai untuk meminta do'a restu dan dukungan dari Pesantren, bahkan menjelang Pemilihan Bupati Tuban maupun Gubernur 2013, sudah tiga kali dari orang yang berbeda meminta do'a restu dan dukungan ke Pesantren Al-Ishlah.

Secara kultural warga NU atau Muhammadiyah memiliki kedekatan antar sesamanya, tapi berbeda ketika di ranah perpolitikan, meskipun Pondok Pesantren berbasis NU atau Muhammadiyah tapi belum tentu berkiblat pada Politik yang dibawa oleh kader-kader NU atau Muhammadiyah. Pondok Pesantren Al-Ishlah merupakan salah satu Pesantren yang berbasis NU di Kabupaten Tuban, tapi tidak pernah terjun dalam perpolitikan, meskipun sering didatangi oleh para Tokoh-tokoh Politik yang terutama dari kalangan NU, Demikian pengakuan dari KH. Mushlih Abdurrohman sebagai berikut:

“Sudah biasa orang-orang partai ke sini meminta dukungan suara, ya banyak, dulu tahun-tahun sebelumnya pasti ya ada yang ke sini, kemaren pemilihan bupati yang ke sini dari PKB, PDI Tuban, Pak Huda (Bupati Tuban) ya kesini, Pilgub kemaren ya PKB lagi dengan Demokrat. Ya semua saya restui, saya dukung, kalau didukung salah satu kan tidak adil”. (Wawancara dengan KH. Mushlih Abdurrohman hari Kamis 26 September 2013 Pukul 18.30)

Bahwa Pondok Pesantren Al-Ishlah sering didatangi orang-orang yang berkepentingan Politik untuk meminta dukungan, tapi Kiai menunjukkan sikap yang bijaksana dengan tidak memilih salah satu untuk didukung, apalagi memobilisasi Santri maupun jama'ahnya untuk memilih salah satu calon peserta Pemilu. Beliau memberi kebebasan Santrinya untuk memilih siapapun sesuai pilihannya, pihak Pondok hanya mengabarkan ketika akan ada Pemilihan Umum. Demikian salah satu pengurus Pesantren Mujib Ridwan memaparkan sebagai berikut:

“Tidak, Yai tidak pernah menyuruh santrinya mendukung salah satu calon pemilu, anak-anak bebas mau memilih siapa ya silahkan, itu haknya masing-masing, meskipun pesantren sering didatangi orang partai, tapi Yai tidak pernah menyuruh para santri mendukung siapapun, tapi biasanya anak-anak mencari informasi ke Rumah Kiai (ndalem) bahwa Yai mendukung siapa, tapi tidak pernah Yai menyuruh mendukung, malah anak-anak yang bingung mencari informasi”. (Wawancara dengan Mujib Ridwan hari jum'at 23 Agustus 2013 Pukul 20.30)

K. Abdul Malik juga menambahkan, kalau ada kebebasan memilih untuk Santri, dan pihak Pondok

Pesantren juga tidak pernah punya perjanjian dengan Partai Politik:

“Tidak ada, Santri akan memilih siapa ya terserah, pondok tidak pernah punya perjanjian sama partai politik atau orang yang berkepentingan. Meskipun pondok sering didatangi oleh orang partai, pondok tidak pernah punya perjanjian mendukung, anak-anak sudah bisa menilai sendiri siapa pilihannya”. (Wawancara dengan K. Abdul Malik hari Kamis 12 September 2013 Pukul 20.00)

Para Santri tidak mendapat pendidikan Politik, tetapi di sisi lain ada pendidikan demokrasi di Pondok Pesantren Al-Ishlah dengan menyarankan seluruh Santri yang memiliki hak pilih untuk mengikuti Pemilihan Umum. Meskipun KH. Mushlih Abdurrohman sering didatangi orang yang berkepentingan Politik, beliau tidak pernah menyuruh para Santrinya untuk mendukung salah satu calon peserta Pemilu. Melihat pemaparan para responden di atas yang menyatakan adanya kebebasan untuk memilih para calon peserta Pemilu tanpa ada yang memobilisasi para Santri untuk memilih calon tertentu, dan dukungan dari pihak Pesantren terutama dari KH. Mushlih Abdurrohman yang meliburkan kegiatan belajar mengajar untuk dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Umum.

Budaya Politik Santri Pondok Pesantren AL-ISHLAH Prambon Tergayang Soko Tuban

Budaya Politik terdiri dari nilai dan sikap yang dianut oleh individu-individu dalam suatu sistem Politik. Nilai dan sikap ini mempengaruhi warga Negara dalam merespon Politik dan mempengaruhi pejabat dalam mengambil keputusan Politik. Budaya Politik menyangkut sikap, emosi, kepercayaan dan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat dalam menanggapi isu-isu Politik dalam suatu sistem Politik.

Persepsi dan sikap masyarakat terhadap masalah Politik bersumber dari pemahaman masyarakat tersebut tentang Politik, yang dibentuk oleh masyarakat melalui Politik yang pada akhirnya kembali mempengaruhi perjalanan Politik itu sendiri.

Para Santri di Pondok Pesantren Al-Ishlah juga merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mempunyai cara pandang atau sikap terhadap Politik yang berkembang di Indonesia, tetapi cara pandang mereka tentu dipengaruhi oleh budaya (*kultur*) Pesantren, karena waktu yang banyak dihabiskan untuk aktivitas di Pesantren. Para Santri yang kegiatannya padat di Pesantren dan banyak mempelajari keagamaan di setiap harinya maka sangat minim para Santri membicarakan tentang Politik. Seperti yang di jelaskan oleh salah satu Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah yang bernama Ahmad Munif sebagai berikut:

“Alah kang, bahas politik ya tidak ada pengaruhnya untuk saya, saya orang biasa, mengaji saja menghafalkan Alfiyah sehari kan lumayan bisa hafal satu lembar..ha..ha. melihat TV ya jarang, mungkin jika ada sepak bola saja keluar pondok ke tetangga

lihat TV”. (Wawancara dengan Ahmad Munif hari Selasa 10 September 2013 Pukul 22.00)

Hal serupa juga dipaparkan oleh KH. Masruhin, S.Pd.I yang mengatakan sebagai berikut:

“Politik itu sederhana, yang memberi uang ya saya pilih, kalau tidak ya tidak memilih, memilih atau tidak memilih ya sama saja, hidup ya tetap begini-begini saja”. (Wawancara dengan KH. Masruhin, S.Pd.I hari Sabtu 8 September 2013 Pukul 20.30)

KH. Masruhin, S.Pd.I menambahkan bahwa dirinya pernah mendapatkan uang ketika Pemilihan Umum, seperti yang dipaparkan sebagai berikut:

“Oalah, pernah tapi sudah lama, ketika masih di rumah Blora, semenjak sudah disini tidak pernah menerima, ketika pemilihan umum ya ikut jika sempat memilih, jika tidak ya tidak ikut”. (Wawancara dengan KH. Masruhin, S.Pd.I hari Jum'at 20 Desember 2013 Pukul 18.30)

Berbeda dengan apa yang dipaparkan oleh informan yaitu Muhzidin salah satu Santri Al-Ishlah, bagaimana menanggapi soal Politik:

“Sebenarnya politik itu baik, tidak ada masalah, itu kan sistem, yang membuat politik jadi masalah itu kan orangnya, bukan begitu?. Kadang ketika pemilihan bagi-bagi uang, tapi kalau sudah jadi melakukan korupsi, kalau ada kepentingan kesini, tapi kalau tidak ada kepentingan lupa orang, kalau tidak jadi tauwuan. Itu kan orangnya, tapi ya tidak semua seperti itu, yang baik juga banyak, tapi yang jelek juga banyak..ha..ha.. lha iya, hanya jabatan aja ko' sampai seperti itu buat apa. Pemimpin yang benar itu seperti Jokowi, itu bagus, memperhatikan orang kecil, tidak membedakan status masyarakat, blusukan seperti katanya di TV-TV. Kalau begitu kan masyarakat merasa diperhatikan. Coba nanti Jokowi mencalonkan presiden saya dukung”. (Wawancara dengan Muhzidin hari Rabu 11 September 2013 Pukul 21.00)

Sama seperti apa yang dipaparkan oleh informan yang satu ini Ustadz Nuruddin Ali mengatakan sebagai berikut:

“Namanya pemerintah kan ya pemimpin rakyat, bagaimanapun caranya yang namanya pemimpin kan harus bisa memakmurkan rakyat, kadang pemerintah itu juga tidak memikirkan orang kecil, bensin mahal, kebutuhan mahal, apa-apa mahal. Kalau belum jadi pemimpin janjinya seperti meyakinkan, tapi kalau sudah jadi presiden, Gubernur atau Bupati sudah lupa janjinya. Kadang begitu itu ya membuat orang jengkel mas, itu yang membuat orang males memilih lagi kalau ada pemilu, lagi pula tidak ada untungnya. Kalau ditanya tentang politik aku tidak faham mas, tapi kalau bahas Qurrotul

Uyun saya fasih..ha..ha.becanda mas. Sekarang begini saja mas, kalau orang punya kepentingan ke orang lain, pasti baik hati, tapi kalau tidak punya kepentingan ya tidak. Biasanya para calon-calon pemimpin itu kan begitu, kalau kampanye memberi sesuatu, menyumbang buat membangun masjid atau pondok pesantren, tapi kalau sudah jadi coba dilihat. Bukannya menjelek-jelekan pemerintah, tapi biasanya begitu yang sudah-sudah". (Wawancara dengan Ustadz Nuruddin Ali hari Rabu 11 September 2013 Pukul 16 .30)

Pemaparan dari para responden diatas memahami Politik selalu identik dengan Pemilihan Umum. Bahwa mereka menilai Politik begitu beragam, ada yang memahami baik buruknya Politik tergantung pelakunya dan ada juga yang berpendapat tidak peduli dengan Politik. Tetapi Pemahaman Santri terhadap jalannya sistem Politik dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dapat terlihat dari jawaban para informan pada saat wawancara mengenai pemerintah khususnya Presiden. Berikut pernyataan dari Ahmad Munif sebagai berikut:

"Menurut saya presiden harusnya menjalankan tugasnya dengan baik, ya karena baik buruknya Indonesia salah satunya juga berasal dari tangan presiden dan bahkan presiden sangat berperan penting dalam perbaikan Indonesia". (Wawancara dengan Ahmad Munif hari Jum'at 20 Desember 2013 Pukul 21.00)

Kepemimpinan merupakan faktor penting di dalam penyelenggaraan Negara. Presiden sebagai pemimpin suatu negara harus dapat menjadi teladan atau contoh yang baik bagi rakyat yang dipimpinnya. Seperti yang diungkapkan Nur Laila mengenai contoh Presiden Indonesia yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik:

"Presiden tidak mengawasi menterinya dengan baik sehingga menterinya itu lalai dalam menjalankan tugas, kemudian dia korupsi dan presiden tidak mengatasi masalah ekonomi padahal rakyat miskin juga punya hak untuk makmur". (Wawancara dengan Nur Laila Hari Jum'at 20 Desember 2013 Pukul 13.00)

Berdasarkan jawaban kedua informan tersebut, dapat dilihat betapa pentingnya peran kepala negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Jika tugas presiden adalah menjalankan amanat Undang-Undang, maka jawaban Santri di atas memperlihatkan pemahamannya terhadap tugas Presiden. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk menginterpretasikan dukungan maupun penolakan terhadap jalannya sistem Politik, karena lingkungannya di pesantren. Berikut pernyataan dari salah satu Santri yang bernama Muhzidin sebagai berikut:

"Apa ya, kalau anak Pondok tidak ada yang dapat dilakukan, ya hanya mengaji. Karena keadaan yang berada di dalam pesantren yang tidak memungkinkan untuk

menyampaikan aspirasi, kita itu siapa ke Presiden gak mungkin ditanggapi". (Wawancara dengan Muhzidin hari Jum'at 20 Desember 2013 Pukul 21 .30)

Berdasarkan jawaban Santri tersebut dapat dilihat bahwa Santri tidak dapat melakukan apa-apa terhadap kebijakan yang diambil Pemerintah. Hal ini diakibatkan oleh kondisi Santri yang berada di dalam Pesantren yang mereka anggap tidak memungkinkan untuk menyampaikan aspirasi. Begitu pula dengan keputusan-keputusan Politik dalam kehidupan masyarakat Pesantren lebih banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh peran seorang Kiai. Seperti yang diungkapkan Anny Farihatun Nisa' sebagai berikut:

"Kiai itu pemimpin, dan apapun yang dikatakannya pasti akan ikuti, karena bagi Santri Kiai adalah teladan yang harus dicontoh". (Wawancara dengan Anny Farihatun Nisa' Hari Jum'at 20 Desember 2013 Pukul 08.45)

Bagi Santri ketaatan terhadap Kiai merupakan kewajiban, apapun perintah Kiai harus dilaksanakan. Kiai dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman agama yang luas serta memiliki keutamaan akhlak sehingga dapat menjadi teladan bagi Santri dan masyarakat di sekitar Pesantren, ini juga diungkapkan KH. Masruhin, S.Pd.I sebagai berikut:

"Santri terhadap Kiai ya harus hormat, sama halnya dengan Murid dan Guru. Kiai patut dicontoh oleh Santri, mengharap barokahnya". (Wawancara dengan KH. Masruhin, S.Pd.I hari Jum'at 20 Desember 2013 Pukul 18.30)

Posisi Kiai sebagai pimpinan Pesantren selalu mendapat posisi yang istimewa di mata para Santrinya. Apapun yang dikatakan Kiai akan diikuti oleh Santri, karena Kiai adalah panutan, contoh bagi santri.

PEMBAHASAN

Kepemimpinan Kiai dalam Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri di Pondok Pesantren AL-ISHLAH Prambon Tergayang Soko Tuban

Hasil penelitian tentang Kepemimpinan Kiai dalam Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah akan diuraikan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana Kepemimpinan Kiai dalam mempengaruhi Partisipasi Politik Santri dan bagaimana Budaya Politik di Pesantren Al-Ishlah. Sebelum membahas jawaban dari kedua rumusan masalah tersebut, perlu kita mengetahui Budaya di pesantren Al-Ishlah.

Pondok Pesantren Al-Ishlah merupakan Pesantren salaf dan Budayanya tidak jauh berbeda dengan Pesantren Salaf lainnya. Ada sikap timbal balik antara Kiai dan Santri, di mana para Santri menganggap Kiainya seolah-olah sebagai bapaknya sendiri, sedangkan Kiai menganggap para Santri sebagai titipan tuhan yang harus senantiasa dilindungi. Sikap timbal balik ini menimbulkan keakraban dan kebutuhan untuk saling berdekatan terus-menerus. Sikap ini juga menimbulkan perasaan tanggung jawab di pihak Kiai untuk mendidik para Santrinya, di samping itu dari pihak para Santri

tumbuh perasaan pengabdian kepada Kiainya. Dilihat dari segi Kepemimpinannya, Kiai mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap para Santrinya karena Karismatik Kiai, bahkan para Santri sangat hormat dan rendah hati (*tawadzu'*) terhadap Kiainya. Zamakshyari Dhofier (1994:56) mengibaratkan Pesantren sebagai kerajaan kecil di mana Kiai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan serta memiliki pengaruh besar dalam kehidupan dan lingkungan Pesantren. Tidak seorang pun Santri atau orang lain yang dapat melawan kekuasaan Kiai (dalam lingkungan pesantrennya).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Kharisma KH. Mushlih Abdurrohman terlihat sebagai figur sentral para Santri untuk menjalankan kehidupan para Santrinya. Semua yang menjadi perintah atau titah Kiai, semua mereka kerjakan sebaik-baiknya, rasa hormat terhadap Kiai sangat kental dirasakan di pesantren Al-Ishlah. Tradisi inilah yang sangat kental dan melekat di Pesantren Salaf, dimana para Santri menganggap bahwa Kiai adalah seorang yang mempunyai barokah untuk kehidupannya kelak.

Model kepemimpinan KH. Mushlih Abdurrohman di Pesantren Al-Ishlah bisa dikatakan *Individual* dan juga *Kolektif*. Bisa dikatakan *Individual*, karena peran dan pengaruh KH. Mushlih Abdurrohman selaku pimpinan pesantren cukup besar dalam pengelolaan pesantren. Serta bisa di katakana *Kolektif*, karena sudah ada pembagian kepengurusan dan berbentuk yayasan. seperti yang dikatakan oleh KH. Masruhin S.Pd.I bahwa adanya pembagian tugas dan wewenang, tetapi KH. Mushlih Abdurrohman masih mempunyai otoritas untuk intervensi dalam pengelolaan pesantren, apa yang menjadi keinginan Kiai harus dilaksanakan pengurus, bukan berarti paksaan, tetapi suatu ketaatan dan kehormatan santri terhadap Kiai. Tetapi di sisi lain juga ada sikap demokratis dari KH. Mushlih Abdurrohman, terlihat selalu adanya musyawarah pengurus terkait pengembangan dan pengelolaan pesantren.

KH. Mushlih Abdurrohman memiliki pengaruh yang cukup besar di lingkungan Pesantren dan Jamaahnya. Hal yang membuat besarnya pengaruh KH. Mushlih Abdurrohman adalah posisinya sebagai elite agama dan Pimpinan Pondok Pesantren yang sangat dihormati oleh para santrinya, karena Kiai dan Santri di Pondok Pesantren Al-Ishlah memiliki hubungan layaknya antara guru dengan murid dalam hubungan formal, Hubungan bapak-anak, yaitu hubungan yang terjalin antara Kiai dengan santrinya sebagaimana layaknya antara bapak dengan anak, karena Santri belajar di Pesantren merupakan titipan dari orang tua Santri kepada Kiai dan Kiai sebagai pengganti orang tua Santri. dan juga Patron-Klien. Kiai sebagai patron, mampu membangun sebuah patronase dengan Santrinya melalui ikatan emosional yang kuat. Patron memberikan jasa kepada Santri baik pengetahuan, material dan harapan barakah serta ilmu bermanfaat. Oleh sebab itu santri sebagai Klien harus memperlihatkan tanda-tanda kehormatan terhadap Kiainya. Seperti yang dipaparkan oleh KH. Masruhin, S.Pd.I, bahwa budaya di Pondok Pesantren diajarkan sopan santun, rendah hati dan hormat terhadap Guru dan

Kiainya. Sesuai yang dikatakan oleh Scott (1993:7) bahwa hubungan Patron-Klien merupakan sebuah pertukaran hubungan antara kedua peran yang dapat dinyatakan sebagai kasus khusus dari ikatan *dyadic* (dua orang) yang terutama melibatkan persahabatan instrumental di mana seorang individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumberdaya yang dimilikinya untuk menyediakan perlindungan dan atau keuntungan bagi seseorang dengan status lebih rendah (klien). Pada gilirannya, klien membalasnya dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan, termasuk jasa pribadi, kepada patron.

Tindakan di atas mendorong terbentuknya pola hubungan yang terjalin antara Kiai dengan Santri sebagaimana pola *paternalistik*. Pola hubungan *paternalistik* yang terjalin antara Kiai dan santri di pesantren di pengaruhi oleh faktor yang berasal dari diri Kiai yang bersangkutan yang memandang Santri sebagai amanat yang harus dididik sebagaimana anaknya sendiri dan tradisi orang tua Santri yang menyerahkan anaknya kepada Kiai secara langsung dan santri yang menganggap Kiai sebagaimana orang tuanya sendiri di Pesantren. Selain itu Kiai juga sebagai atasan yang memiliki kekuasaan terhadap bawahannya (Santri), sehingga Santri harus taat terhadap Kiainya. Amin Haedari (2004:61) mengatakan Terdapat dua pola hubungan antara Kiai dan Santri. *Pertama*, pola hubungan *Otoriter-Paternalistik*. Yaitu pola hubungan antara pimpinan dan bawahan (*Patron-Client Relationship*). *Kedua*, pola hubungan *laissez faire*, Yaitu pola hubungan Kiai dengan Santri yang tidak didasarkan pada tatanan organisasi yang jelas, semuanya didasarkan pada restu Kiai. Selama memperoleh restu dari sang kiai, sebuah pekerjaan bisa dilaksanakan. Santri ikhlas menjalankannya dan berharap mendapatkan barakah dari kiai.

Berdasarkan pemaparan di atas Kiai memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan baik di bidang Sosial, Ekonomi, maupun Politik, karena Kiai merupakan kelompok elite yang bisa mempengaruhi masyarakat terutama pada Santrinya. Sihaloho (2003:153) mengatakan dalam setiap masyarakat, terdapat dua kelas penduduk satu kelas menguasai dan satu kelas dikuasai. Kelas pertama jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu. Sedangkan kelas kedua jumlahnya selalu lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama.

Posisi strategis seorang Kiai sebagai kelas yang menguasai dalam kehidupan politik dapat mempengaruhi partisipasi politik para Santrinya, karena Partisipasi Politik dalam masyarakat yang tergolong aktif, pasif maupun golput tergantung faktor yang mempengaruhinya.

Partisipasi politik para santri Al-Ishlah hanya terlihat ketika ada Pemilihan Umum, karena para Santri hanya mengetahui kegiatan Politik itu hanya sekedar Pemilihan Umum, baik itu pemilihan Presiden, Gubernur, maupun Bupati. Kurangnya pendidikan dan pemahaman

Politik menjadikan Santri di Pesantren Al-Ishlah memahami Politik hanya sebatas Pemilu.

Tidak adanya pendidikan Politik bagi para Santri di Pesantren Al-Ishlah membuat Santri kurang paham dengan kegiatan Politik, sehingga memicu Santri untuk acuh terhadap kegiatan Politik, kecuali pemilihan umum yang mereka ketahui bahwa itulah Politik. Pendidikan Politik memang perlu untuk para Santri seperti apa yang dikatakan oleh Anny Farihatun Nisa', karena agar para Santri memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara yang baik. Pendidikan Politik juga membuat para individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem Politik, selain itu juga agar mereka menjadi warga Negara yang memiliki kesadaran tanggung jawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kesadaran berpartisipasi Politik. Ramlan Surbakti (1992:196) mengatakan Pengetahuan Masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil.

Tetapi mereka faham dan sadar bahwa Pemilihan Umum itu adalah hajat masyarakat yang harus ikut serta dan banyak para Santri yang menggunakan hak pilihnya. Seperti pada pemilihan Gubernur kemarin banyak Santri yang menggunakan hak pilihnya. Seperti yang dikatakan oleh M. Ikhsan Hanafi bahwa Santri PP. Al-Ishlah selalu ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum. Selain itu dari pihak Pondok Pesantren juga ikut mendukung terlaksananya pesta rakyat tersebut dengan meliburkan kegiatan belajar mengajar di Pesantren ketika ada Pemilihan Umum.

Partisipasi Politik yang dilakukan Para Santri di pesantren Al-Ishlah adalah *partisipasi pasif* yaitu hanya mengikuti ketika pemilihan umum. *Partisipasi Pasif* menurut Ramlan Surbakti (1999:142) yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati perturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Mereka juga tidak ada yang terlibat sebagai tim pemenangan atau tim sukses salah satu calon peserta pemilu. Meskipun pasif dalam berpartisipasi politik, para Santri Al-Ishlah sangat antusias menggunakan hak pilihnya di Pemilihan Umum seperti yang dikatakan oleh M. Ikhsan Hanafi. Dukungan dari Pimpinan Pesantren yaitu KH. Mushlih Abdurrohman kepada para Santri untuk berpartisipasi Politik dalam pemilihan umum juga terbukti dengan meliburkan kegiatan belajar mengajar di Pesantren ketika ada Pemilihan Umum.

Bentuk antusiasnya para Santri ikut berpartisipasi dalam Pemilu dipengaruhi oleh berbagai sebab, ada yang karena kesadaran pribadi seperti yang dikatakan oleh Anny Farihatun Nisa' (*Mengikuti pemilu itu kan haknya semua warga negara Indonesia dan kesadaran diri ikut berpartisipasi kan buat kemaslahatannya rakyat Indonesia*). Salah satu faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi Politik menurut Samuel (2001:199) adalah faktor karakteristik pribadi seseorang, Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, budaya, biasanya mau terlibat dalam aktivitas

politik. Tetapi kebanyakan dari mereka yang ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum karena memang sudah perintah Kiainya. Seperti pemaparan dari Bpk. Abdul Malik bahwa para Santri disarankan ikut berpartisipasi dalam pemilu, seperti pemilihan Gubernur banyak Santri yang menggunakan hak pilihnya karena memang sudah disarankan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu oleh Pengasuh Pesantren, bahkan kegiatan belajar mengajar diliburkan satu hari ketika pelaksanaan Pemilu.

Hal di atas menunjukkan adanya pengaruh seorang Kiai yang terlihat di pesantren Al-Ishlah ketika ada Pemilihan Umum. Para Santri sangat hormat kepada Kiainya, terbukti ketika ada perintah untuk mengikuti partisipasi dalam pemilihan umum para santri banyak yang mengikutinya. Keadaan tersebut karena adanya hubungan *Patron-Klain* antara Kiai dan Santri, sehingga Santri merasa sebagai bawahan atau anak didik yang harus patuh terhadap Kiainya. KH. Mushlih Abdurrohman selalu bersikap bijaksana meskipun posisinya sebagai Kiai sangat dihormati dan diikuti oleh santrinya, beliau tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk mendukung salah satu calon peserta pemilu. Beberapa kali pesantren sering di datangi orang-orang partai untuk meminta do'a restu dan dukungan dari pesantren, bahkan menjelang pemilihan Bupati Tuban maupun Gubernur 2013 sudah tiga kali dari orang yang berbeda meminta do'a restu dan dukungan ke pesantren Al-Ishlah.

Tetapi di sisi lain ada pendidikan demokrasi di Pondok Pesantren Al-Ishlah dengan menyarankan seluruh Santri yang memiliki hak pilih untuk mengikuti Pemilihan Umum. Meskipun KH. Mushlih Abdurrohman sering didatangi orang yang berkepentingan Politik, beliau tidak pernah menyuruh para santrinya untuk mendukung salah satu calon peserta Pemilu. Seperti yang dikatakan oleh Mujib Ridwan salah satu responden yang menyatakan adanya kebebasan para santri untuk memilih para calon peserta pemilu, bahkan mereka yang mencari tahu pilihan Kiai dengan harapan bisa mengikutinya, dan juga tidak ada yang memobilisasi para Santri untuk memilih calon tertentu.

Budaya Politik Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Prambon Tergayang Soko Tuban

Budaya Politik suatu kelompok menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan orientasi seseorang terhadap Politik, sehingga mempengaruhi Partisipasi Politik. Almond dan Verba (Dalam Afan Gaffar, 2005:101) mendefinisikan budaya Politik sebagai Suatu sikap orientasi yang khas warga Negara terhadap sistem Politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga Negara yang ada di dalam sistem itu.

Santri di Pondok Pesantren Al-Ishlah dalam Partisipasi Politik juga di pengaruh oleh Kiai, lingkungan dan Budaya Politik di Pesantren. Jalbi (dalam Ruslan 2000:101-102) mengatakan bahwa partisipasi Politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh jenis Kultur Politik, atau bentuk nilai dan keyakinan tentang kegiatan Politik yang mempengaruhinya. Terkadang Kultur Politik

mendorong seseorang untuk berpartisipasi Politik secara aktif, tetapi terkadang justru menjadikan seseorang buta Politik.

Orientasi dan pandangan Politik para Santri Al-Ishlah begitu beragam. Berdasarkan pemaparan informan yang memahami Politik selalu identik dengan Pemilihan Umum. Ada yang memahami baik buruknya Politik tergantung pelakunya dan ada juga yang berpendapat tidak peduli dengan Politik. Tetapi Pemahaman Santri terhadap jalannya Sistem Politik dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dapat terlihat dari jawaban para informan. Jika berdasarkan pemaparan Ahmad Munif dan KH. Masruhin S.Pd.I serta Nur Laila bagaimana memahami tugas sebagai Presiden dan pengetahuannya tentang Politik maka tipe orientasi Politiknya adalah *Komponen Kognitif*.

Komponen Kognitif Menurut Almond dan Verba (Dalam Afan Gaffar, 2005:99-100) yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya sistem Politik dan aributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijakan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politik, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lain sebagainya. Sedang dari pemaparan Muhzidin dan Nuruddin Ali dapat diketahui bahwa mereka cukup memperhatikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan politik, mereka bisa menilai dinamika Politik ketika para calon sebelum dan sesudah jadi Pemimpin. Secara teori yang di katakan oleh Almond dan Verba (1990:20-22) informan ini tergolong tipe *Komponen Evaluative* dalam orientasi Politiknnya. *Komponen Evaluatif*, yaitu menyangkut keputusan dan praduga tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Berdasarkan pemaparan para informan yaitu Muhzidin dan Nuruddin Ali, yang memiliki harapan-harapan tentang pemerintahan dan pendapat mengenai Politik, seperti yang dikatakan bahwa baik-buruknya Politik itu tergantung aktornya dan pemerintah harus memakmurkan dan memperhatikan rakyat. Melihat pamarana para informan, Budaya Politik yang terjadi di Pesantren Al-Ishlah cenderung *Budaya Politik Kaula*, karena mereka memiliki Orientasi terhadap Sistem Politik, namun itu hanya bersifat masukan, karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan keadaannya di dalam pesantren. Mereka menyadari meskipun menyampaikan aspirasi itu tidak ada gunanya, karena mereka menganggap dirinaya adalah orang biasa yang tidak bisa menentukan apaun.

Budaya Politik Subyek/Kaula menurut Almond dan Verba (1990:20-22) memiliki frekuensi orientasi-orientasi yang tinggi terhadap sistem politik, namun perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan (*input*) sangat rendah. Subjek individual menyadari akan otoritas pemerintah yang memiliki spesialisasi, ia bahkan secara afektif mengorientasikan diri kepadanya, ia memiliki kebanggaan terhadapnya atau sebaliknya tidak

menyukainya, dan ia menilainya sebagai otoritas yang absah. Namun demikian, posisinya sebagai subyek (kaula) mereka pandang sebagai posisi yang pasif. Diyakini bahwa posisinya tidak akan menentukan apa-apa terhadap perubahan politik. Mereka beranggapan bahwa dirinya adalah subyek yang tidak berdaya untuk mempengaruhi atau mengubah sistem. Dengan demikian secara umum mereka menerima segala keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam masyarakat. Bahkan rakyat memiliki keyakinan bahwa apapun keputusan/kebijakan pejabat adalah mutlak, tidak dapat diubah-ubah, dikoreksi apalagi ditentang.

PENUTUP **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa KH. Mushlih Abdurrohmam merupakan figur sentral yang sangat dihormati oleh para Santrinya. Rasa hormat Santri terhadap Kiai sangat kental dirasakan di pesantren Al-Ishlah, dimana para Santri menganggap bahwa Kiai adalah seorang yang mempunyai barokah, maka mereka dengan senang hati mengikuti apa yang diperintahkan oleh Kiainya.

Posisi Kiai sebagai *Patron* dengan kepemimpinannya mampu mempengaruhi Santri (*Klain*) untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum. Melihat Partisipasi politik Santri di Pondok Pesantren Al-Ishlah adalah *partisipasi politik Pasif*, yaitu hanya berpartisipasi mengikuti Pemilihan Umum. Minimnya pengetahuan Politik dan faktor lingkungan keberadaannya di Pesantren yang padat dengan kegiatan Pesantren, membuat mereka menjadi pasif dalam berpartisipasi Politik.

dasarkan klasifikasinya, Budaya Politik yang terjadi di Pesantren Al-Ishlah cenderung *Budaya Politik Kaula*, karena mereka memiliki Orientasi terhadap Sistem Politik, namun itu hanya bersifat masukan, karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan keadaannya di dalam pesantren. Mereka menyadari meskipun menyampaikan aspirasi itu tidak ada gunanya, karena mereka menganggap dirinaya adalah orang biasa yang tidak bisa menentukan apaun.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang sudah diuraikan diatas maka diharapkan pondok pesantren menerapkan pendidikan politik terhadap para santrinya, agar para santri sadar akan kehidupan politik dan memahami nilai-nilai ideal politik. Kemudian untuk penelitian selanjutnya yang serumpun agar dikembangkan dari penelitian ini dan bisa dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Almond. A Gabrriel dan Verba. 1990. *Budaya Politik Tingkah laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

- Afan Gaffar. 2005. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Amin Haedari, dkk. 2004. *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*. Jakarta: IRD Press
- Amin Hadari dan M. Ishom El Saha. 2004. *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah*. Jakarta: Diva Pustaka
- Arifin, Imron. 1993. *Kepemimpinan Kiai; Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*. Malang: Kalimasada Press
- Budiardjo, Miriam. 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Buche B. soedjojo dan manfred ziemek.1986. *pesantren dan perubahan social*. Jakarta: P3M
- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Edisi Ketiga. Terjemahan oleh Achmad Fawaid. 2010*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dhofir, Zamakhyari. 1994. *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta:LP3ES
- Faisal Ismail. 1999. *NU Gusdurisme dan Politik Kiai*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- George R. Terry. 2000. *Prinsip – prinsip Manajemen, (edisi bahasa Indonesia)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Harold Koontz dan Cyril O'Donnel, 1959. *Principles of Management, An Analysis of Managerial Function, Light Edition*. New York: Mc. Graw Hill Book Company Inc
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari. 2004. *Kepemimpinan yang Efektif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Huntington, Samuel P. dan Nelson, John. 2001. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Indrawati, Fitri. 2011. *Strategi Penanaman Nilai dan Moral di Panti Asuhan Khadijah 3 Surabaya*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: JPMP-KN FIS Unesa
- Kartini, Kartono. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Madjid, Nurcholis. 1997. *Bilik-bilik pesantren*. Jakarta: Paramadina
- Mujamil Qomar. 2004. *Pesantren. Dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Intitusi*. Jakarta: Erlangga
- Najid, E. Shobirin. 1985. *Perspektif Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren, dalam M. Dawam Rahardjo, (ed), Pergulatan Dunia Pesantren Membangun Dari Bawah*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat
- Rush, Mighael dan Philip Althoff. 1997. *Pengantar Sosioologi Politik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja grafindo
- Ruslan, Ustman Abdul Muiz. 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Scott, James C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor
- Shonhaji Sholeh. 1997. *Pesantren dan perubahan santri*. No.6 juni
- Syafie Kencana, Inu. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syarbaini, Syahril dkk. 2004. *Sosiologi dan Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Susilo, Suko, dkk. 2003. *Sosiologi Politik*. Surabaya: Yayasan Kampusina Surabaya
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D*. Bandung, Alfabeta
- Usman, Husaini, R. Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Pengantar Statistika. Edisi kedua*. Jakarta: Bumi Aksara